

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, perkembangan dunia bisnis mengalami peningkatan yang cukup pesat yang ditandai dengan munculnya perusahaan – perusahaan baru dari berbagai macam sektor. Hal ini menyebabkan semakin ketatnya tingkat persaingan antar pelaku dunia bisnis. Persaingan antar pelaku dalam dunia bisnis yang terjadi akan mempengaruhi aktivitas bisnis yang dimana pada umumnya dilakukan untuk mencapai suatu tujuan utama setiap perusahaan yaitu memaksimalkan keuntungan atau profit untuk kepuasan para pemegang saham dan investor yang bermanfaat baik terhadap citra suatu perusahaan.

Demi mencapai keuntungan pribadi, banyak perusahaan melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alam tanpa mempedulikan akibat yang akan terjadi dari aktivitas tersebut. Hal tersebut seringkali membuat perusahaan lalai dan mengabaikan dampak lingkungan dan sosial yang akan terjadi yang ditimbulkan dari berjalannya aktivitas perusahaan tersebut. Perusahaan yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan akan memberikan dampak yang buruk untuk masa mendatang dan akan menimbulkan berbagai masalah sosial dan juga lingkungan.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan hidup (Walhi) yang diperoleh dari situs walhi.or.id terdapat 14 pengaduan dari mengenai kasus-

kasus pembangunan dan ancaman kerusakan lingkungan di Jawa Barat. Salah satu contoh kasus ancaman kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh suatu pabrik setempat, dimana mereka membuang limbah ke sungai yang mengakibatkan pencemaran sungai dan menimbulkan bau yang tidak sedap di Kawasan Perumahan Pesona Madani dan Graha Dinatera Kota Depok.

Contoh lainnya lagi pada 29 Mei 2006, terdapat kasus dimana PT Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo mengalami kebocoran pengeboran sehingga mengakibatkan semburan lumpur panas dan gas yang meluas dan terus menerus hingga kini. Bahkan kejadian tersebut menyebabkan tewasnya 17 orang serta mengakibatkan kerugian hingga total 45 trilyun rupiah. kemudian juga tragedi lumpur panas karena eksploitasi gas yang dilakukan PT. Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya.

Pemerintah membuat kebijakan untuk mendukung adanya suatu tanggungjawab perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial, ekonomi melalui UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 UU yang menyebutkan bahwa:

“(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Peraturan mengenai kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu perusahaan tidak hanya diatur dalam perundang-undangan, tetapi dibahas juga di dalam Al Quran yang menjelaskan bahwa agama Islam memerintahkan umat manusia untuk menjaga serta bertanggung jawab kepada sosial dan lingkungan. Terdapat ayat yang menjelaskan dampak perbuatan tangan manusia yang tidak bertanggungjawab dan melarang umat manusia melakukan perbuatan yang berakibat kerusakan di bumi. Larangan tersebut tercantum pada Al Quran QS Ar Rum: 41 – 42.

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia: Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), Berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.” (QS Ar Rum: 41 – 42).

Hal-hal yang telah dipaparkan di atas kemudian menjadikan perusahaan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan dan aktivitas operasional perusahaan tersebut dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Untuk mencegah adanya penyimpangan tanggungjawab sosial dan lingkungan seperti kasus yang telah dipaparkan tersebut, kini *stakeholders* menuntut perusahaan mulai memperhatikan pembangunan jangka panjang mengenai isu lingkungan dan sosial. Pembangunan jangka panjang harus memikirkan pembangunan yang

sesuai di masa saat ini, dengan tetap mempertimbangkan bagaimana generasi mendatang dapat memenuhi kewajibannya.

Beberapa perusahaan di Indonesia mulai menyeimbangkan antara aktivitas orientasi keuntungan ekonominya dengan aktivitas sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaannya. Kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk kepentingan sosial dan lingkungannya disebut dengan *Triple Bottom Line (3P)*. Konsep *Triple Bottom Line (3P)* mengemukakan konsep baru dimana bahwa perusahaan sekarang tidak lagi hanya berfokus pada keuntungan (*profit*) saja, namun suatu perusahaan juga harus turut serta berperan dan berpartisipasi dalam kesejahteraan masyarakat sekitar (*people*) serta turut berkontribusi aktif dalam pelestarian lingkungan (*planet*). Sinergi tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Informasi-informasi mengenai konsep *Triple Bottom Line (3P)* yang telah dipaparkan di atas kemudian diungkapkan dalam bentuk sebuah laporan yang terpisah dari laporan keuangan perusahaan, yaitu Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Report*. Konsep ini mengusung tentang pengungkapan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menggambarkan aktivitas operasi perusahaan yang tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, seiring dengan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masa depan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Setyawan dkk (2018) yang meneliti tentang “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan

Institusional, Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*". Aspek yang diteliti yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen pada perusahaan non perbankan dan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Penelitian ini memperoleh hasil yaitu kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Di dalam suatu perusahaan apabila di dalamnya ada kepemilikan manajerial, maka diprediksikan akan lebih banyak mengungkapkan informasi kepada publik. Informasi tersebut berbentuk laporan keuangan tahunan dan juga informasi tambahan laporan berkelanjutan *sustainability report*. Penelitian yang menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *sustainability report* dilakukan oleh Badjuri (2011), Nurrahman dan Sudarno (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*. Penelitian lain juga dilakukan oleh Aulia dkk (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Faktor kepemilikan institusional yang tinggi akan mendorong perusahaan dalam kegiatan tanggungjawab sosialnya melalui

pengungkapan *sustainability report* secara luas dan transparan agar tidak terjadi asimetri informasi antara agen dan *principal*. Penelitian mengenai kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *sustainability report* dilakukan oleh Badjuri (2011), Pratama dan Yulianto (2015) yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Penelitian lain juga dilakukan oleh Uyar, Kilic, dan Bayyurt (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional akan meningkatkan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan di Turkey. Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Aulia dkk (2016).

Dewan komisaris independen merupakan faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Semakin besar proporsi dewan komisaris independen akan menyebabkan peningkatan kegiatan terhadap pengawasan pada mutu pengungkapan *sustainability report* serta meminimalisir usaha/kegiatan untuk tidak melaporkan informasi perusahaan. Penelitian yang menguji mengenai dewan komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela dilakukan oleh Agusti dan Oktavianna (2019) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Penelitian lain juga dilakukan oleh Amelia (2013), Fitriana dan Prastiwi (2014), Aulia dkk (2016) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan sustainability report adalah *ownership dispersion* atau kepemilikan saham publik. Kepemilikan saham oleh publik mendorong perusahaan mengungkapkan informasi *sustainability report* yang lebih komprehensif pada laporan tahunan. Publik atau pihak eksternal perusahaan yang memiliki kepemilikan saham membutuhkan informasi yang komprehensif mengenai perusahaan tempat mereka menanamkan modalnya. Penelitian yang menguji hubungan *ownership dispersion* terhadap pengungkapan sukarela dilakukan oleh Putri, Yuniarta, dan Darmawan (2015) dan Wardani (2011) yang menunjukkan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Penelitian lain yang dilakukan oleh Erna (2014), Wijayanti (2009), Delvinur (2015), Vernando dan Halmawati (2016) menunjukkan proporsi *ownership dispersion* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.

Financial distress juga merupakan faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Ketika suatu perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik, manajemen perusahaan tidak akan memiliki keraguan untuk langsung menyajikan dan mengungkapkan informasi tambahan mengenai perusahaannya yang dapat berupa *sustainability report* karena kondisi keuangan yang sehat mampu meningkatkan citra perusahaan di mata investor. Namun, berbeda ketika suatu perusahaan terindikasi *financial distress*, informasi yang disajikan didalam laporan keuangan kepada publik cenderung akan dibatasi dan dikurangi. Kesalahan dalam

mengungkapkan informasi dapat memperburuk citra perusahaan di mata investor. Penelitian yang menguji hubungan *financial distress* terhadap pengungkapan sukarela dilakukan oleh Vernando dan Halmawati (2016) yang menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Penelitian lain yang dilakukan oleh Poluan dan Nugroho (2015) dan Immanuel (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang berada dalam kondisi *financial distress* akan melakukan pengungkapan lebih sedikit untuk menutupi keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* adalah umur *listing*. Perusahaan yang lebih lama beroperasi akan menyediakan publisitas informasi yang lebih luas dan lebih banyak secara transparan dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri (Vernando dan Halmawati, 2016). Penelitian yang menguji hubungan umur *listing* terhadap pengungkapan sukarela dilakukan oleh Erna (2014) menyatakan bahwa umur *listing* tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wardani (2011), Vernando dan Halmawati (2016) yang menunjukkan bahwa umur *listing* berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Setyawan dkk (2018). Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian sebelumnya menggunakan 3 variabel independen yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 6 variabel

independen yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, *Ownership Dispersion*, *Financial Distress*, Umur *Listing* dan variabel dependen pengungkapan *Sustainability Report*. Sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan non perbankan dan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah variabel independen yang akan diuji secara empiris pada penelitian ini hanya hanya menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, *ownership dispersion*, *financial distress*, umur *listing* yang belum bisa menunjukkan faktor memengaruhi perusahaan dalam pengungkapan *sustainability report*. Variabel dependen yang diuji secara empiris pengungkapan *sustainability report*. Sampel yang digunakan perusahaan sektor pertambangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka secara umum dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*?

3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*?
4. Apakah *ownership dispersion* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*?
5. Apakah *financial distress* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*?
6. Apakah umur *listing* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *sustainability report*
2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *sustainability report*
3. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report*
4. Pengaruh *ownership dispersion* terhadap pengungkapan *sustainability report*
5. Pengaruh *financial distress* terhadap pengungkapan *sustainability report*
6. Pengaruh umur *listing* terhadap pengungkapan *sustainability report*

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar dapat kesesuaian antara teori dan praktek khususnya terkait pengungkapan *sustainability report*, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan tambahan informasi untuk perusahaan terkait bagaimana perlunya *sustainability report* diungkapkan. Diharapkan pengungkapan *sustainability report* dapat memberikan gambaran mengenai pembangunan jangka panjang bagi suatu perusahaan dengan memperhatikan segala aspek sosial dan lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan guna pengambilan keputusan dan sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pengambilan dan pembuatan keputusan investasi terhadap perusahaan.